

## Policy Brief 3

# Resiliensi Perempuan dalam Menyikapi Pandemi COVID-19

## PENDAHULUAN

Salah satu temuan kajian Komnas Perempuan “Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” adalah tingginya daya lenting (resiliensi) perempuan untuk meredam dampak, beradaptasi terhadap pandemi, dan berjejaring sesama perempuan (Komnas Perempuan, 2020d). Definisi daya lenting atau ketahanan perempuan adalah kemampuan untuk mengatasi, beradaptasi terhadap kejadian kehidupan yang sulit, dan bangkit kembali (Reivich K & Shatté A, 2002). Namun, hal ini sulit diukur secara kuantitatif, walau dapat dirasakan. *Policy brief* ini bertujuan menyajikan empat studi kasus di tahun 2020 untuk menggambarkan resiliensi perempuan dari aspek keberanian, keuletan, kepekaan, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, dan tetap konsisten pada misi dan visi di masa Covid-19. Data studi kasus didapat Komnas Perempuan dari berbagai wawancara daring dengan individu narasumber, *focus group discussion* (FGD) dan Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan & PPHAM di masa COVID-19 (Komnas Perempuan, 2020a). Diperlihatkan bagaimana dan apa langkah-langkah yang diambil perempuan dalam menghadapi pandemi, serta sejauh mana kontribusi perempuan untuk menjaga kehidupan dirinya, keluarganya dan komunitasnya. Badan kesehatan dunia mengatakan perempuan adalah tulang punggung pelayanan kesehatan, karena 70% tenaga kesehatan di dunia adalah perempuan (WHO, 2018). Di Indonesia, jauh sebelum pandemi, perempuan sudah merupakan tenaga kesehatan terdepan.

**Keempat studi kasus** yang disajikan memperlihatkan empat fokus: **(1)** inisiatif lembaga pengada layanan untuk terus melindungi *survivors* kekerasan selama masa pandemi; **(2)** inisiatif berbasis komunitas dalam bentuk solidaritas ekonomi; **(3)** inisiatif dapur umum sebagai skema penyangga masyarakat miskin kota; dan **(4)** inisiatif lembaga keagamaan secara inklusif dalam kegiatan kemanusiaan.

## INISIATIF LEMBAGA PENGADA LAYANAN: TERUS MELINDUNGI SELAMA MASA PANDEMI

Lingkar Belajar Untuk (LIBU) Perempuan di Palu dan Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) di Ambon, Maluku menjadi contoh studi kasus pertama. Keduanya adalah pengada layanan berbasis masyarakat sipil (swasta) yang secara inovatif memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tidak surut karena pandemi COVID-19.

**Penguatan jejaring relawan dan kepemimpinan perempuan.** LIBU Perempuan melihat munculnya kebingungan pada perempuan dan anak yang belum pulih dari bencana gempa-tsunami-likuifaksi (28 September 2018), segera berjejaring dengan beragam relawan dan 'paralegal', memperkuat sistem rujukan yang sudah ada sebelum pandemi. Pemanfaatan teknologi informasi *whatsapp group* digunakan untuk penguatan koordinasi. Kepemimpinan perempuan mencuat di hunian sementara, dengan dukungan dari pemerintahan desa, relawan dan jejaring dengan perempuan lain. Diantaranya, menghasilkan inovasi 'rumah aman untuk *survivors*' yang dikelola oleh komunitas, lengkap dengan skema dukungan keamanan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban (Komnas Perempuan, 2020b, 2020c).

**Keterlibatan lembaga lokal.** LIBU Perempuan juga berhasil melibatkan secara aktif lembaga lokal dan tokoh adat untuk membantu pemerintah desa. Strategi efektif adalah menggunakan bukti nyata kekerasan akibat perkawinan anak, untuk mengedukasi para mitra bahwa hal ini bertentangan dengan nilai yang dijunjung di masyarakat, dan meminta pemerintah desa berperan nyata dalam melaksanakan perlindungan hak korban kekerasan sesuai regulasi. Peran aktif pemerintah desa ternyata efektif, mempertemukan komunitas dan layanan rujukan kasus kekerasan setempat. Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak disebarluaskan berikut alamat kontak untuk dihubungi. Informasi ini dituliskan dalam *banner* yang ditempel di kantor desa. Dukungan masyarakat dan keluarga terlihat dari respon individu perempuan *survivor* yang datang langsung ke kantor setelah mengetahui informasi dari *banner* tersebut. Terbukti manfaat langsung bagi perempuan, lewat akses tindak lanjut layanan perlindungan terhadap kekerasan (Komnas Perempuan, 2020d).

Hal serupa dilakukan Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) di Ambon, Maluku. Mereka terus mencari kasus-kasus semasa pandemi COVID-19 malah sampai ke pulau-pulau/daerah terpencil. Menyadari kepemilikan *smartphone* tidak merata dan akses internet tidak menjangkau wilayah luas, LAPPAN memperluas jejaring penanganan kasus kekerasan dengan menciptakan kolaborasi antara posko gereja dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam identifikasi pelaku serta membangun sistem rujukan (Komnas Perempuan, 2020b).

**Pentingnya layanan integratif dan pemulihan yang memandirikan korban.** Secara simultan LAPPAN mengidentifikasi lembaga pengada layanan aktif dan tidak aktif, sehingga didapat skema

rujukan yang lebih efektif. LAPPAN kerjasama dengan P2TP2A untuk mengawal korban selama penyusunan BAP di kepolisian hingga ke persidangan. Koordinasi dengan Kepolisian memperkuat posisi keluarga ketika pelaku yang biasanya orang 'dekat' mulai mengintimidasi korban, terutama pada korban kekerasan seksual. LAPPAN menerima dukungan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dalam penguatan kapasitas layanan pemulihan psikososial secara daring. Terutama pada kasus kekerasan seksual anak dengan kehamilan tak direncanakan, advokasi diarahkan supaya anak perempuan bisa kembali sekolah setelah selesai melahirkan. Sekaligus dibangun sistem pendukung dari keluarga terdekat untuk pemulihan kesehatan reproduksi dan dukungan komunitas untuk tidak menyalahkan korban (Komnas Perempuan, 2020b).

**Dukungan penguatan kapasitas relawan melalui forum belajar.** Pimpinan perempuan juga peka akan pentingnya penguatan kapasitas relawan. LIBU membuka forum belajar antara bulan April hingga Oktober 2020, sejumlah 24 kali forum belajar daring dengan berbagai narasumber dan tema-tema baru. Namun, tantangan terbesar adalah kesulitan pemenuhan akses telepon dan internet, terutama di pulau-pulau dan daerah terpencil yang sering banyak *blank spots*. Solusi kreatif misalnya menggantung *handphone* (HP) di pohon seperti di pulau Seram sehingga satu HP bisa untuk digunakan bersama.

LIBU Perempuan dan LAPPAN merupakan contoh ujung tombak upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Situasi pandemi COVID-19 tidak mengendurkan semangat mereka. Mereka mengubah layanan luring menjadi daring (Komnas Perempuan, 2020b). Akses internet yang tidak merata, sulitnya penerapan protokol Kesehatan, dan penurunan jumlah relawan - tidak mengurangi semangat berjejaring. Untuk dapat lebih optimal, diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah, agar pengada layanan non-pemerintah seperti LIBU Perempuan dan LAPPAN sanggup bertahan sebagai tolok ukur daya lenting perempuan dalam meredam dampak pandemi dan beradaptasi terhadap pandemi.

## **EKONOMI BERBAGI DI MASA PANDEMI: GERAKAN SOLIDARITAS PEREMPUAN EMPU**

Dampak ekonomi COVID-19 menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan sehari-hari. Gerakan solidaritas perempuan EMPU berhasil menggunakan kegiatan berbasis ekonomi menjangkau masyarakat di pulau Jawa dan luar Jawa seperti Aceh dan Sulawesi Tengah.

Dua pendekatan dilakukan bersamaan. **Pertama** donasi langsung berupa distribusi 30 ribu masker pada Maret 2020 dan bahan makanan anak bawah tiga tahun (batita) dan anak bawah 5 tahun (balita), lansia, yatim piatu, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, narapidana perempuan, penyintas kekerasan, pengungsi pasca gempa Sulteng dan banjir Luwu (Sulsel), nelayan (di Semarang), sampai kelompok perempuan petani garam di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Donasi ke tenaga kesehatan/puskesmas di wilayah terluar dan terpencil berupa masker, *face shield* dan alat pelindung diri (APD), bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). **Kedua**, membangun kemandirian (memberi alat bantu) dengan distribusi 3.000 kantong benih kepada lebih dari 500 perempuan/keluarga, kelompok perempuan petani garam, penyintas kekerasan, serta korban pasca bencana di Jabodetabek, Jawa Timur, Padang, Sumba Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, sampai

Ambon. Juga mengorganisir 201 perempuan bakul jamu di Tangerang, Yogyakarta dan sekitarnya, Batu-Malang, Cilacap, Sumenep (Madura), Palu serta Ambon. Inovasi ini dilengkapi upaya menjaga kualitas lewat skema Pamong Jamu yang memposisikan pelanggan rutin jamu sebagai pihak *quality control* (aspek penerapan protokol kesehatan dan aspek kebersihan). EMPU juga memilih mitra tepat yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat memberi bimbingan teknis higienitas dan Yayasan Benih Baik yang memberi bimbingan mekanisme pendanaan akuntabel.

Di Ambon, upaya pengembangan jamu dan ketahanan pangan ternyata berhasil menghubungkan berbagai komunitas yang sebelumnya tersegregasi. Terbangun kerjasama antara komunitas perempuan Katolik di Lourdes, komunitas perempuan Kristen di Waihoka dan komunitas perempuan muslim di Arbes. Kerjasama ini juga dilanjutkan dengan berbagi benih pangan dan sayuran antar komunitas. Secara tidak langsung EMPU berhasil mengurai sekat dan prasangka warisan konflik, dan gerakan ekonomi solidaritas menjadi media untuk memperkuat perdamaian.

**Akuntabilitas: kunci sukses pengelolaan relawan dan bisnis berkeadilan.** Transparansi model tata kelola komunitas yang diterapkan EMPU menjadi kunci keberhasilan karena cocok untuk menggerakkan solidaritas ekonomi dan relawan perempuan. Melalui model kerelawanan perempuan ini, skema ekonomi solidaritas berhasil mengusung nilai-nilai baru tentang penghargaan dan dukungan bagi kelompok terpinggirkan. Akses kepada pasar melalui akses teknologi informasi memungkinkan mendapat nilai tambah bagi produk jamu. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perempuan pelaku wirausaha menjadi keberhasilan perempuan dalam beradaptasi dengan pandemi (Komnas Perempuan, 2020d).

## DAPUR UMUM: dari DAPUR DOMESTIK ke DAPUR PUBLIK

Bentuk kelentingan lain diperlihatkan oleh respon kolektif dapur umum yang diorganisir Solidaritas Pangan Jogja (SPJ). Pada awalnya, SPJ diinisiasi oleh aktivis perempuan dengan pemetaan sosial berbasis gender terhadap dampak pandemi pada buruh gendong, tukang becak, pedagang asongan dan pemulung di Yogyakarta (awal Maret 2020). Temuan menunjukkan kelompok paling terdampak adalah kaum miskin kota, pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, buruh dan pemulung. Mahasiswi/a kemudian turut berpartisipasi, dan disambut juga oleh anggota Aisyiyah dan kelompok pengajian di Gamping dan Seyegan. Diawali dengan aksi membagikan 50 nasi bungkus melalui dapur rumahan (domestik) untuk menjawab hasil pemetaan, berlanjut dengan munculnya dapur ke-2, ke-3 dan seterusnya. Munculnya dapur umum terus bertambah di Balirejo, dikelola aktivis perempuan, mahasiswa dan jaringan pekerja rumah tangga (PRT), khusus melayani buruh gendong pasar Beringhardjo dan Giwangan. Perluasan sasaran di Prawirotaman, Condong Catur, Wonocatur, dan Keparakan juga meluas ke pemulung dan lansia, disertai dapur bongsuwung untuk pekerja seks komersil (PSK), dapur untuk transpuan dan dapur sembungan. Selain aktivis, turut juga ibu rumah tangga, pelajar, seniman, miskin kota dan warga biasa. Dalam kurun waktu satu bulan telah terbangun 15 dapur umum, dengan produksi 100-200 nasi bungkus per hari. Selama kurang lebih 5 bulan dari Maret hingga Agustus 2020, model **pengelolaan logistik, penyediaan bahan dan pengelolaan dapur SPJ**

**dikelola oleh relawan**, termasuk bantuan sayur dari petani, dan sembako beras dan telur. Kunci sukses upaya penggalangan dana dari masyarakat adalah **transparansi dan akuntabilitas**. Dibangun kepercayaan melalui rapat koordinasi dua mingguan, serta pelaporan donasi melalui *website* SPJ setiap bulan. Rapat koordinasi menjadi jembatan penghubung antara dapur umum, produsen (petani, peternak) dan penerima nasi bungkus (Komnas Perempuan, 2020d).

Di akhir tahun 2020, hanya dua dapur umum masih berjalan yaitu dapur lansia dan pekerja seks komersil (PSK), karena dibutuhkan sebagai skema penyangga hidup kedua kelompok tersebut. **Dapur umum menjadi ruang bersama dan kesadaran kolektif** untuk menjawab persoalan kekurangan pangan, serta **ruang perjumpaan antar mereka yang selama ini tersegregasi** oleh sekat dan prasangka sosial, seperti antara ibu-ibu majelis taklim dan PSK (Komnas Perempuan, 2020d). Bagi mereka yang tidak terjangkau aksi pembagian nasi bungkus, seperti pedagang di pantai Parangtritis, SPJ juga mendistribusikan bahan mentah produksi lokal (beras, gula, teh dan minyak). Kolaborasi SPJ dan Jaringan Gusdurian **menyediakan lahan dan pendampingan teknis** oleh petani Kulon Progo kepada masyarakat miskin kota dan mahasiswa terdampak COVID-19 yang dapat mengembangkan ketahanan pangan.

Kelentingan perempuan ditandai dengan kegigihan mengatasi berbagai tantangan seperti pendanaan, manajemen dan segregasi sosial. Bukan hal mudah, karena pandemi berbeda dengan bencana, tidak jelas kapan pandemi akan selesai. Terkait manajemen, tantangan sekaligus peluang yaitu pengelolaan relawan yang mayoritas anak muda. Sedangkan kepekaan akan segregasi sosial menjadi tantangan terberat karena ditambah kendala dampak praktik penerapan karantina wilayah yang seperti meneguhkan segregasi sosial antara warga asli dan pendatang. Pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan produk hukum dengan sanksinya, pernah menyebabkan SPJ mengalami tindakan represif dari aparat keamanan (April 2020) yang membubarkan kegiatan dapur umum. Namun kegigihan (aspek lain dari kelentingan perempuan) tidak menyurutkan SPJ, lewat advokasi ke pemerintah tindakan represif berhasil diredam (Komnas Perempuan, 2021).

SPJ tetap konsisten dan menyelipkan agenda monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap dapur umum. Dengan sistematis selebaran tentang alamat lembaga pengada layanan bagi perempuan *survivors* kekerasan ditempelkan saat distribusi nasi bungkus dan masker di simpul-simpul komunitas (Komnas Perempuan, 2020d). Bagi kelompok miskin kota yang sebagian merupakan penduduk tidak tetap, hal ini membantu memperkecil jurang pemisah dengan penduduk asli dalam upaya bertahan hidup dan beradaptasi dengan dampak pandemi.

## **GERAKAN KEAGAMAAN INKLUSIF UNTUK PEREMPUAN DAN KEMANUSIAAN**

Kepemimpinan perempuan pada organisasi yang berafiliasi kepada ormas keagamaan dan aliran kepercayaan juga tampak nyata dalam merespon krisis. Kelentingan perempuan ditonjolkan di aspek kepekaan akan hak asasi manusia yang menempatkan kondisi krisis dampak pandemi sebagai bencana kemanusiaan dan harus diatasi tanpa membeda-bedakan agama. Hasil analisis media (daring/cetak/televisi nasional/media sosial) oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan *Indonesia Indikator* menyimpulkan:

Upaya kemanusiaan Aisyiyah dan Muslim/Fatayat tidak hanya berupa bantuan sembako, sosialisasi protokol, distribusi masker dan APD. Melalui pemetaan dampak COVID-19 di 85 desa dengan kelompok terdampak, juga dilakukan gerakan membangun kemandirian pangan melalui lumbung hidup, budidaya ikan dan kangkung. Konsistensi terhadap misi dan visi terlihat dari Muslimat/Fatayat yang tetap memonitor ibu hamil dan kampanye tentang pengaturan jarak kehamilan (Komnas Perempuan, 2020d).

Upaya kemanusiaan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Wanita Buddhis Indonesia (WBI) dan Organisasi Kristen seperti Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) juga merupakan gabungan donasi sembako, masker dan PAD, serta bantuan membangun tempat cuci tangan di tempat ibadah guna edukasi dan penerapan protokol kesehatan. Komunitas Budhis melalui dewan pembina Wandani juga aktif mensosialisasikan 'ibadah dari rumah' kepada jemaahnya, jaga jarak di tempat ibadah, dan sedapatnya kebaktian mingguan dilakukan secara daring (Komnas Perempuan, 2020d).

Survei dan FGD daring Aisyiyah serta *in-depth interview* terhadap 218 unsur pimpinan Aisyiyah dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat menunjukkan bahwa **perempuan bukanlah pihak yang pasif, tapi secara aktif mampu melakukan berbagai upaya kepedulian** untuk lingkungan sekitar. Hasil survei menunjukkan 87% responden perempuan telah melakukan donasi sembako, 98% responden melakukan edukasi pencegahan COVID-19, 49% responden membantu pemasaran daring usaha mikro dan kecil, dan 22% melakukan advokasi kebijakan, serta pengembangan lumbung pangan (Komnas Perempuan, 2020d). Perempuan bersama komunitas keagamaan mampu menjadi agen perubahan yang dapat meredam dampak pandemi secara inklusif, tidak terbatas di komunitas masing-masing saja.

## KESIMPULAN

Daya lenting perempuan (resiliensi) diperlihatkan ke-empat studi kasus sebagai kemampuan meredam dampak, beradaptasi dan berjejaring ketika menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Perintah 'tinggal di rumah' dan 'bekerja dari rumah' ternyata dampaknya memiliki dimensi gender, meningkatkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan membutuhkan upaya perlindungan anak. Komnas Perempuan dengan cepat menanggapi dampak pandemi dengan analisis gender. Ke-empat studi kasus yang ditampilkan dalam *Policy Brief* ini menguraikan enam kesimpulan:

1. Tanpa menunggu paket perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, lembaga penyedia layanan dengan gigih mencari kasus dan meneruskan perlindungan *survivors* tindak kekerasan, beradaptasi menjadi lebih inovatif ('rumah aman') dan berjejaring lebih rapat dengan mitra baru (paralegal, aparat keamanan, pemerintahan desa, posko gereja, dan komunitas lintas agama) untuk melindungi perempuan dan anak;
2. Kepemimpinan perempuan mencuat, mampu berkoordinasi secara terbuka menggunakan sarana digital praktis (*WA group*), dan berhasil mendapat pengakuan, kepercayaan dan dukungan keluarga, komunitas dan masyarakat;

3. Model tata kelola komunitas yang diterapkan cocok untuk menggerakkan solidaritas ekonomi dan manajemen kerelawanan perempuan, serta berhasil melakukan pembagian kerja relawan yang setara, pengelolaan logistik yang transparan, pengelolaan dana yang akuntabel, tanpa melupakan misi untuk memonitor kasus kekerasan terhadap perempuan;
4. Perempuan dapat melakukan '*multi-tasking*' - memimpin, sekaligus berpartisipasi; mediasi sebagai jembatan penghubung antara produsen (petani, peternak) dan penerima bantuan pangan (lansia, PSK dan kelompok miskin kota lainnya); menciptakan ruang pertemuan antar berbagai unsur (majelis taklim, PSK, warga asli, pendatang (*liyan*)) - menghasilkan kekuatan kolektif untuk mengatasi tantangan pendanaan dan segregasi sosial;
5. Aksi dapur umum menjadi simbol penguatan politik perempuan karena dapur sesungguhnya adalah ranah politik perempuan yang selama ini didomestikasi dan tidak mendapat pengakuan. Kemunculan dapur umum di berbagai kota adalah dampak positif kebangkitan gerakan solidaritas berbasis masyarakat yang berhasil mengurai sekat dan prasangka yang diwariskan dari konflik. Ekonomi solidaritas adalah penguat perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan.
6. Kepekaan perempuan tentang hak asasi manusia diperlihatkan organisasi perempuan lintas agama yang mampu menghadapi dampak pandemi secara inklusif, tapi juga konsistensi akan misi dan visi.

Kesimpulan ini tidak hanya membuktikan kekuatan daya lenting perempuan tetapi menjadi bukti bahwa warga negara perempuan mampu berperan dan bertanggungjawab baik secara individu maupun kolektif.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

- **Penguatan efektivitas lembaga pengadalaan dan kepemimpinan perempuan dalam struktur kelembagaan** dengan penyediaan pelatihan pemberdayaan perempuan tentang '*leadership*', negosiasi, kolaborasi, berkomitmen, yang berkontribusi terhadap kesetaraan/keadilan gender, dan promosi dan pencegahan *social stigma* agar perempuan tidak mudah di 'label', '*stereotype*', dan diskriminasi – dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
- **Peningkatan kapasitas** pelatihan paralegal yang berkelanjutan di level kabupaten/kota dan kecamatan/kelurahan, pelatihan menyusun skema rujukan, pemetaan *shelter*/rumah aman, pemulihan psikososial, dan monitoring dan pelaporan 'kekerasan' terhadap perempuan kepada penyedia layanan lokal.
- **Peningkatan kompetensi lembaga perempuan melibatkan aparat pemerintahan** dari tingkat desa atau RT/RW di kota, sampai ke tingkat nasional, sesuai dengan kaidah pembangunan RPJMN IV 2020-2024: *membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan*.
- **Pelatihan ketrampilan membangun skema akuntabilitas, manajemen relawan yang setara, manajemen logistik yang transparan, manajemen keuangan yang akuntabel**, serta monitoring pemantauan kekerasan terhadap perempuan secara '*real time*'. Dukungan modal dan sumberdaya untuk pelatihan perlu diakomodir oleh pemerintah tanpa diskriminasi kepada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat (swasta).

- **Peningkatan *coverage* media sosial tentang tindak kekerasan baik terhadap perempuan, anak dan lansia di tingkat keluarga, komunitas, cyber atau daring, ranah publik dan negara. Materi digunakan sebagai materi pelatihan paralegal yang berkelanjutan** dan edukasi masyarakat umum, tokoh adat dan agama, serta Kementerian terkait termasuk Kementerian KetenagaKerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, selain Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator PMK, dan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- **Perluas pelatihan literasi digital bagi perempuan**, cara menggunakan media baru berbasis teknologi informasi (twitter, Instagram dan lainnya) baik untuk membantu pemasaran usaha ekonomi perempuan, ataupun untuk berbagi bukti tindak kekerasan seperti dampak negatif perkawinan anak, dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan akses *Base-Transceiver-Stations* (BTS) di wilayah yang masih banyak *blank spot*, *sulit signal*, dan tidak ada/sedikit *smartphones*.
- **Dukungan nyata Kementerian terkait\***, untuk meningkatkan *coverage* sosial media tentang **tindak kekerasan** baik terhadap perempuan, anak dan lansia di tingkat keluarga, komunitas, *cyber* atau daring, ranah publik dan negara, serta menggunakan materi/bukti yang ada dalam pelatihan yang diadakan/didukung.

Catatan: Kementerian terkait\* adalah: Bappenas, Kementerian KetenagaKerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator PMK, dan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, dan tidak terbatas pada yang disebutkan disini.

Lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan di Indonesia dapat diakses melalui laman: <https://komnasperempuan.go.id/mitra-komnas-perempuan/pengadalaan>

## DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2020a). Hasil Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan & PPHAM di Masa COVID-19 pada 12 Agustus 2020. Komnas Perempuan: sub-komisi pemulihan.
- Komnas Perempuan. (2020b). Laporan kajian dampak persebaran dan kebijakan COVID-19 terhadap penyedia layanan dan perempuan pembela HAM (PPHAM). Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020c). Melayani dengan Berani: Gerak Juang Penyedia Layanan dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Masa Pandemi COVID-19. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020d). Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Memperkuat Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi COVID-19. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan FGD: Validasi Policy Brief 3 pada 18 Februari 2021. Komnas Perempuan.
- Reivich K, & Shatté A. (2002). The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles. Broadway books.
- WHO. (2018). Women in the health workforce. 7th March 2018. <https://www.who.int/hrh/events/2018/women-in-health-workforce/en/>